
PENDIDIKAN RAMAH ANAK DI SURAKARTA : SINERGITAS, KOMUNIKASI ORGANISASI, DAN MODAL SOSIAL

Mochammad Sinung Restendy

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammad.restendy@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Program pendidikan ramah anak atau Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan program yang diinisiasi oleh UNICEF dengan *leading sector* tiap kota kabupaten adalah Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak masing masing daerah. Pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya dukungan serta komunikasi yang baik dari berbagai pihak juga modal sosial yang kuat di daerah masing masing. Maka dari itu, perlunya sinergi dan kerjasama antara kementerian, swasta, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan fokus penelitian pada Kota Surakarta, Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Utama enam kali berturut – turut sejak tahun 2016, dan saat ini berproses menuju Kota Layak Anak Dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jaringan komunikasi dibangun antar lembaga dalam mewujudkan Pendidikan ramah anak di Surakarta. Modal sosial apa saja yang dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi organisasi mewujudkan Pendidikan ramah anak di Surakarta dan mengetahui dampak komunikasi organisasi mewujudkan Pendidikan ramah anak di Surakarta bagi lembaga – lembaga yang terlibat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif fenomenologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF sebagai inisiator mendorong *leading sector* membangun jejaring kemitraan mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan komunikasi organisasi yang lebih dominan, secara formal pada konsep ketergantungan, terbuka, bersinergi dan terjadi pada segala arah. Kebijakan, evaluasi, kontrol program, pembelajaran budi pekerti sejak dini, etika atau moral sebagai modal sosial dan didukung oleh upaya penguatan sumber daya organisasi. Dampak dari komunikasi organisasi yang dilakukan DP3AP2KB Surakarta dan mitra jejaring layanan adalah keterpaduan dan sistem integral dalam penanganan kasus baik kesehatan, catatan sipil, pendidikan, dan kasus kasus tertentu di Sekolah Ramah Anak.

Kata kunci: PRA/SRA, Sinergitas, Komunikasi Organisasi, Modal Sosial

ABSTRAK

The child-friendly education program or Child-Friendly Schools (SRA) is a program initiated by UNICEF with the leading sector for each district city being the respective regional Women's and Child Protection Services. Program implementation cannot be carried out optimally without support and good communication from various parties as well as strong social capital in each region. Therefore, there is a need for synergy and cooperation between ministries, the private sector, local government and the community. With a research focus on the City of Surakarta, a Child Friendly City (KLA) with the Main title six times in a row since 2016, and is currently in the process of becoming a World Child Friendly City. The aim of this research is to determine the communication network built between institutions in realizing child-friendly education in Surakarta. What social capital is used to support organizational communication in realizing child-friendly education in Surakarta and knowing the impact of organizational communication in realizing child-friendly education in Surakarta for the institutions involved. This research methodology uses a qualitative phenomenological approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews and document study. The research results show that UNICEF as the initiator encourages the leading sector to build a partnership network to create Child Friendly Schools (SRA) with more dominant organizational

communication, formally based on the concept of dependency, openness, synergy and occurring in all directions. Policy, evaluation, program control, early learning of character, ethics or morals as social capital and supported by efforts to strengthen organizational resources. The impact of organizational communication carried out by DP3AP2KB Surakarta and service network partners is an integrated and integral system in handling cases including health, civil registration, education and certain cases in Child Friendly Schools.

Keywords: PRA/SRA, Synergy, Organizational Communication, Social Capital

PENDAHULUAN

Program pendidikan yang ramah pada anak merupakan bagian dari upaya memaksimalkan potensi diri masing-masing anak dengan baik. Konsep dan pengertian pendidikan ramah anak menurut Hajarah yaitu sebuah sekolah yang mengedepankan rasa, aman, nyaman, riang, menarik, menghormati hak anak, asah, asih, asuh, aspiratif dan komunikatif serta, efektif (Shunhaji & Hasanah, 2019).

Pelaksanaan Program Pendidikan Ramah Anak (PRA) dipelopori oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) bekerjasama dengan Perusahaan Swasta dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama. Tidak ketinggalan di akar rumput membutuhkan pelibatan aktif Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Pemerintah Desa, organisasi setempat dan juga Masyarakat (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2020). Selama berada di satuan pendidikan, kebijakan perlindungan tersebut dibuat dengan program Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kota Layak Anak.

Konsep pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dalam Konferensi Habitat II atau City Summit yang diadakan di Istanbul, Turki. Pada konferensi ini, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan "Child Friendly City Initiative" dimana konsep Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari hasil yang diperoleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) setelah melakukan penelitian mengenai "Children's Perception of the Environment" di 4 kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City pada kurun waktu antara tahun 1971-1975.

Konsep kota layak anak di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 2006. Kota yang pertama kali mengembangkan konsep ini pada tahun 2006 adalah kota Surakarta atau dikenal juga dengan kota Solo. Konsep kota layak anak adalah konsep yang berasal dari pemerintah pusat yang kemudian diterapkan di Kota Solo dibawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai walikota saat itu. Penerapan konsep kota layak anak di kota Surakarta terus berkembang hingga menghantarkan kota tersebut meraih

Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) sebanyak enam kali berturut-turut sejak tahun 2016. Kota Surakarta saat ini terus mengembangkan diri dengan berada di garis depan dalam upaya mewujudkan Kota Global Ramah Anak atau Jaringan Inisiatif Kota Ramah Anak Global (CFCI) UNICEF. Kota Surakarta layak mensejajarkan diri dengan kota-kota besar di dunia dalam hal memberikan kenyamanan, keamanan dan pemenuhan hak kepada anak (Kemendikbud, 2014).

SRA (Sekolah Ramah Anak) merupakan program kegiatan yang mensosialisasikan dan mengimplementasikan kelembagaan pendidikan dengan keadaan yang bersih, aman, sehat, mencerminkan kepedulian sekitar dan membangun kebudayaan juga lingkungan hidup, sehingga terjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak dari ancaman intoleransi, kekerasan, *bullying*, diskriminasi, juga bermacam perilaku tidak tepat lainnya, disaat anak berada dalam lembaga pendidikan serta melibatkan aktif partisipatif anak utamanya dalam aturan, kebijakan, perencanaan, pembelajaran, evaluasi, monitoring dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak (SRA). seiring perkembangannya sangat diharapkan mampu memenuhi hak juga melindungi sepertiga hidup anak atau delapan jam dalam satu hari, selama anak ada di lembaga pendidikan (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2020).

Program Sekolah Ramah Anak (SRA). ini bukan membangun lembaga pendidikan baru melainkan membuat lembaga pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak dan memberi kepastian sekolah bisa mewujudkan hak anak juga memberi perlindungan, sebab lembaga pendidikan merupakan rumah kedua untuk anak, setelah rumahnya sendiri bersama keluarga inti atau keluarga besarnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2015). Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak menyebutkan bahwa, Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi sistem kelembagaan pendidikan resmi (formal), nonformal, juga informal yang bisa mewujudkan hak anak juga perlindungannya yang didalamnya juga ada prosedur teknis pelaporan, pengaduan terhadap sebuah kasus sebagai langkah preventif di lingkup kelembagaan pendidikan. Program Sekolah Ramah Anak (SRA). juga merupakan sebuah kerjasama untuk melindungi anak di satuan pendidikan, dikerjakan secara menyeluruh oleh Kementrian atau Lembaga yang memiliki program basis sekolah.

Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan sekolah ramah anak dilakukan dengan pemberian fasilitas berupa bus sekolah, bantuan seragam sekolah, serta beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Pemkot Surakarta juga memberlakukan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yaitu setiap hari Ahad s.d Jumat, antara pukul 18.30-20.30 yang bertujuan untuk mengarahkan anak-anak agar tetap belajar di rumah. Salah satu wilayah yang menjadi percontohan program ini adalah Kelurahan Jebres. Di kelurahan ini masyarakat secara mandiri membentuk satgas yang mengawasi pelaksanaan GWJB.

Pengawasan dilakukan dengan cara berkeliling kampung sambil melakukan sosialisasi, mengarahkan anak-anak yang masih berada di luar rumah untuk belajar dan menyarankan para orang tua untuk mematikan TV agar tidak mengganggu konsentrasi anak saat belajar (Republika, 2022).

Keberhasilan Kota Surakarta dalam merealisasikan Sekolah Ramah Anak tidak terlepas dari modal sosial yang sudah ada dijaga dan dikembangkan dengan baik. Modal sosial yang dimiliki Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Ramah Anak adalah berupa konsep kearifan lokal budaya Jawa yang mendukung dalam pembentukan karakter dasar yang baik pada anak-anak. Budaya Jawa diperkenalkan pada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah di Kota Surakarta melalui beberapa cara yaitu pelajaran Bahasa daerah, permainan tradisional, dan kesenian Jawa yang dikemas dalam pelajaran muatan lokal. Pada UU RI No 20 Th 2003 (Tambahan Lembaran Negara RI Th 2003 No 4301) khususnya Pasal 37 ayat (1) tentang butir bahasa dijelaskan sebagai berikut: Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. bisa menjadi dasar diterapkannya mata pelajaran bahasa Jawa di tingkat sekolah menengah. Keberhasilan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah akan memberikan kontribusi dan penjaminan bagi kelestarian bahasa Jawa, identitas daerah (Jawa), dan pemberian pendidikan budi pekerti yang efektif demi peningkatan kualitas moral anak bangsa (Supeni et al., 2021).

Sekolah Ramah Anak (SRA). tidak berjalan baik di semua tempat. Banyak keprihatinan di Kota Kabupaten lain dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak di lembaga dan sekitarnya menjadi bukti Sekolah Ramah Anak (SRA). belum berjalan secara maksimal. Kasus ratusan kekerasan anak di NTB tahun 2023, Pamekasan yang belum punya payung hukum pendidikan inklusi, Kabupaten Kota lain yang masih dini KLA predikat utamanya, maraknya perkawinan anak di Sukabumi tahun 2024, 107 kasus kekerasan anak tercatat di Pontianak dilakukan di Sekolah pada tahun 2024, dan 141 kasus kekerasan anak di Makasar terjadi sepanjang tahun 2024. Ini menunjukkan belum baiknya sistem SRA disadari dan diaplikasikan dengan baik di tengah masyarakat di sebagian Kabupaten Kota di Indonesia (Amrina et al., 2022).

Salah satu cara dalam memaksimalkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). adalah memahami kebijakan, teori, dan prosedurnya dengan baik. Sekolah Ramah Anak (SRA). akan diselesaikan dengan baik salah satunya dengan komunikasi. Dimana, dalam komunikasi ada modal sosial yang bisa dimaksimalkan seperti kepercayaan, nilai, moral, sistem, dan jaringan. Strategi, susunan, tugas, prosedur, keluasan, dan cakupan organisasi secara umumnya ditentukan oleh metode dan teknis komunikasi (Toha, 2002). Sehingga komunikasi organisasi menjadi salah satu arah penting dan modal sosial penentu kebijakan dan penguatan jejaring program SRA di Surakarta. Pada program Pendidikan

Ramah Anak juga banyak teori dan prosedur yang harus dijalankan dengan komunikasi, terlebih UNICEF sebagai inisiator dalam program Sekolah Ramah Anak dengan beberapa model percontohan yang sudah diterapkan untuk mewujudkan program utama Pendidikan Ramah Anak. Salah satu tujuan pendidikan yang ramah anak yaitu untuk mengembangkan potensi atau minat bakat anak. Pengoptimalan hal-hal itu tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya dukungan serta komunikasi yang baik dari lingkungan sekitar baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun Masyarakat (Wuryandani et al., 2018).

Melihat hasil kajian peneliti, sampai saat ini peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang cukup sesuai dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, **Yang pertama** “Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok”. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan MaksuDosen Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini memuat temuan antara lain : (1) hasil positif dan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok (2) Komunikasi yang baik antara guru, siswa, pemerintah daerah, lembaga, orangtua dan masyarakat. (3) terbatasnya anggaran dan sarana prasaran yang mendukung program Sekolah Ramah Anak. **Yang kedua**, “Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak” Penelitian yang dilakukan oleh Wuri WuryandaniDosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Didalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran di Sekolah Ramah Anak sangat memperhatikan pendapat dan kemauan anak juga pengembangan minat dan bakat anak. Dalam hal penilaian melihat potensi masing masing dan tidak membandingkan tetapi memaksimalkan apa yang ada pada diri mereka. **Yang ketiga**, “Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak Melalui Penguatan Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)” Penelitian yang dilakukan oleh Ajang Rusmana, seorang Doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengembangan (research and development). Didalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga penguatan budaya tercermin pada kegiatan intra dan ekstra sekolah kemudian implementasi budaya yang dinamis disesuaikan dengan kearifan lokal dalam harmoni pengembangan sekolah yang ramah anak.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang khusus membahas teori, prosedur dan penerimaan Komunikasi Organisasi sebagai Modal Sosial Pendidikan Ramah Anak yang menyeluruh belum penulis temukan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Komunikasi Organisasi sebagai Modal Sosial Program Pendidikan Ramah Anak UNICEF (Studi Riset Program Pendidikan Ramah Anak di Jawa Tengah). Menarik untuk memperdalam bagaimana UNICEF sebagai badan PBB yang mengurus anak-

anak mampu berkomunikasi organisasi dengan baik terkait program Pendidikan Ramah Anak yang dijalankan di Kota Surakarta sehingga berkembang sampai pada target final Kabupaten Layak Anak saat ini. Mengharmonikan dan membangun kerjasama antara kementerian, swasta, pemerintah daerah dan masyarakat dalam komunikasi dan aturan kebijakan yang berujung akhir pada pendidikan ramah anak. Dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan pendalaman penelitian ini dengan judul “Komunikasi Organisasi sebagai Modal Sosial Program Pendidikan Ramah Anak UNICEF (Studi Riset Program Pendidikan Ramah Anak di Jawa Tengah).

METODE

Pendekatan penelitian ini jenisnya adalah kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Dengan menarasikan subyek dan obyek sesuai data temuan lapangan. Ada pembahasan tentang negosiasi, percakapan, dialog dari pergeseran realita dan kebijakan yang ada yang menunjukkan komunikasi organisasi dilakukan. Analisis *purposive* diterapkan untuk mengamati bagaimana program Pendidikan Ramah Anak UNICEF di Surakarta dilakuka oleh semua stakeholders. Adapun kajian mendalam yang dijadikan kriteria adalah sekolah ramah anak, perwakilan kaum perempuan, dan lembaga terkait. Jika data belum memadai, maka informan diambil melalui “sampel bola salju” agar bisa ditemukan bedah analisa teorinya, dimana saat tada tambahan data tidak akan ada lagi pemberian sumbangsih untuk temuan hal yang baru (Strauss, 1990). Teknik dalam mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pada dokumen yang ada.

Peneliti melakukan wawancara mendalam. Pertanyaan berfokus pada persoalan bagaimana komunikasi organisasi dan manajemen publik dibangun di tingkat pusat sampai mengakar di daerah dengan semua jejaring hingga diterapkan di sekolah. Analisis menggunakan model interaktif partisipatif yang dipakai Miller juga Huberman yang meliputi tiga komponen mulai dari reduksi data, dilanjutkan *display* data kemudian pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan komunikasi dibangun antar lembaga untuk mewujudkan Pendidikan ramah anak di Surakarta

Jaringan komunikasi organisasi yang dipilih untuk membangun serta meningkatkan hubungan internal dan eksternal lembaga dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak kota Surakarta dapat dilihat dari efisien dan efektifnya kerja serta tercapainya target. Komunikasi organisasi menurut Mulyana adalah sebuah proses membuat dan saling menukar pesan dalam sebuah jaringan yang saling

bergantung untuk mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah, seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau dinas terkait di kota Surakarta agar tercapainya tujuan pendidikan ramah anak sebagai salah satu indikator kota layak anak.

Sebelumnya, komunikasi organisasi menurut Direktur Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK), Shoim Sahriyati adalah segala upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya, baik di tingkat internal maupun di eksternal. Hal itu berkaitan dengan surat menyurat, kebijakan, strategi yang dikembangkan oleh lembaga (Andriani, 2022). Sedangkan menurut Risti Istiorenny, komunikasi organisasi proses penyampaian atau penerimaan informasi untuk bertukar informasi antar organisasi.

Berdasarkan analisis peneliti, jaringan komunikasi organisasi sebagai modal sosial yang diterapkan oleh leading sector yaitu DP3AP2KB Surakarta yang juga sekaligus lembaga mandatory UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PLKSAI Surakarta dan Yayasan KAKAK juga mitra layanan sekolah ramah anak lainnya lebih dominan pada salah satu sistem komunikasi yaitu komunikasi formal, sebuah sistem dibuat mengalir yang ditentukan oleh hierarki resmi atau struktur organisasi. Selain itu juga menerapkan sistem sosial Katz dan Khan, hal tersebut diketahui dari praktik komunikasi organisasi yang dilakukan DP3AP2KB Surakarta, PLKSAI Surakarta dan Yayasan KAKAK.

DP3AP2KB Surakarta dalam membangun atau meningkatkan hubungan internal maupun eksternal organisasi mencapai tujuannya yaitu dengan berkomunikasi, berjejaring, bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa bidang layanan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ada Ketahanan Keluarga (K2), pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA), Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) dan Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang kesemuanya ada satgasnya di sekolah sekolah.

Selain itu, DP3AP2KB juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memahamkan kepada tenaga pendidik bahwa akan bersama-sama menerapkan satuan pendidikan yang ramah anak. Seperti halnya ketika ada kasus anak, maka PTPAS dan Puspaga akan membantu menangani, karena hal ini sudah terintegrasi dengan dinas pendidikan melalui peran gugus tugas KLA. Bukan hanya itu, lembaga atau organisasi yang tergabung dalam tugas tugas KLA Surakarta telah saling terintegrasi komunikasi dan terkoordinasi, bahkan sudah tertuang dalam SK Walikota dan memiliki tupoksi atau memahami kondisi kerjanya masing-masing serta sudah menjadi tanggung jawab OPD atau *stakeholder* terkait. Bahkan, sampai membuat tiga kali pertemuan dalam setahun yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program (Andriani, 2022).

PLKSAI Surakarta juga menerapkan strategi dan sistem komunikasi organisasi yang dibangun untuk menguatkan program atau jejaring dengan melakukan pertemuan rutin bersama para koordinator dalam rangka pemecahan masalah bersama. Hal itu dilatarbelakangi karena rasa saling terkait dan saling membutuhkan, sehingga ada upaya untuk tolong menolong dan bersinergi dalam memecahkan suatu kasus atau masalah. Namun, menjalankan programnya tetap bekerja secara integratif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti halnya PLKSAI secara sosial di rehabilitasinya, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di identitasnya, Dinas Pendidikan berfokus pada masalah pendidikan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda tetapi bertujuan sama yaitu untuk saling memenuhi kebutuhan anak dengan layanan yang berbeda, sehingga dapat saling mengambil informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan dan menjadi makin sepaham. PLKSAI juga memanfaatkan berbagai platform seperti media sosial, banner dan lain-lain sebagai media komunikasi dan publikasi. Dengan begitu, banyak layanan yang bisa diakses ketika muncul berbagai masalah (Istrioreny, 2022).

Sedangkan sistem komunikasi organisasi yang dibangun Yayasan KAKAK dan membangun jejaring layanan adalah dengan mengembangkan komunikasi organisasi, sesuai dengan SOP yang ada di lembaga. Komunikasi dengan jaringan KAKAK, dikategorikan pada tingkat nasional dan kota. Masing-masing ditunjuk oleh lembaga SDM yang mengikuti jejaring kemudian disesuaikan dengan tanggungjawab staf pelaksana harian terhadap isu yang ada. Untuk jaringan di tingkat nasional menjadi tanggungjawab dari pengurus pelaksana harian. Komunikasi organisasi melalui media KAKAK (Website, IG, Youtube, FB) juga diperhatikan terutama yang berkaitan dengan konten materi, SDM yang mengembangkan, dan tampilan media (Sahriyati, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa, dalam mencapai tujuan pendidikan ramah anak dan kota layak anak DP3AP2KB Surakarta, PLKSAI Surakarta dan Yayasan KAKAK saling ketergantungan, sehingga selalu terjalin koordinasi dengan lembaga atau organisasi yang berkaitan. Konsep keterbukaan juga terjalin, dalam artian aktif berkomunikasi dan bersinergi agar tidak menimbulkan hambatan sehingga mudah mendapatkan informasi dan sepaham dengan tujuan awalnya. Selain itu, beragam upaya strategi komunikasi juga dilakukan untuk menjalin jejaring layanan yang bertujuan menguatkan program baik di tingkat internal maupun eksternal organisasi. Bahkan, penyesuaian dan pembaharuan organisasi juga dilakukan agar tidak menghambat sistem sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan efektif.

Berkaitan dengan proses jaringan atau aliran komunikasi di internal organisasi terdapat komunikasi vertikal dalam artian terjalin secara *top-down* seperti pemberian tugas atau pengumuman dari pimpinan ke bawahan dan *bottom-up communication* yaitu ketika staf pelaksana program menyampaikan hasil evaluasi kepada para koordinator atau pimpinan. Namun, dalam beberapa kasus, komunikasi informal kadang terjalin. Seperti halnya berkoordinasi *via chat* atau telepon setelah itu baru

berkirim surat dan melakukan rapat koordinasi. Selain itu, dalam mencapai tujuan pendidikan layak anak antar lembaga dapat disimpulkan saling ketergantungan, sehingga pada praktiknya lebih dominan pada arah atau jaringan komunikasi horizontal, karena terjalin komunikasi dengan melakukan berkoordinasi, pemecahan masalah, saling memberikan informasi dan menjamin pemahaman yang sama. Sedangkan pola komunikasi organisasi ketiga lembaga tersebut lebih condong pada pola segala arah atau bintang, karena tidak terpusat pada pemimpin, semua bisa saling berjejaring satu sama lain walaupun tidak bersebelahan.

Modal sosial dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi organisasi mewujudkan Pendidikan ramah anak di Surakarta

Berdasarkan data BPS tahun 2020 penduduk Kota Surakarta mencapai 578.492 jiwa dengan 162.630 atau 28% nya merupakan anak-anak dan selebihnya adalah orang dewasa. Maka, orang dewasa harus melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) serta diberi perlindungan khusus jika termasuk dalam 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Kota Surakarta sebagai locus penelitian ini merupakan kota *pilot project* dalam program Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang pertama kali diuji coba pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2022 Kota Surakarta menerima penghargaan Kota Layak Anak Utama, setelah sebelumnya juga secara berturut-turut memperoleh peringkat di kategori tersebut. Pada tahun 2022 ini Kota Surakarta juga meraih tiga penghargaan yang lain, yaitu pembinaan forum anak terbaik dan terinspirasi, inisiator pembentukan UPT PPA (UPT Perempuan Anak Surakarta), dan Daffa Award Pelopor Kesehatan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, n.d.).

Analisis juga menunjukkan bahwa praktik komunikasi formal yang dipilih bisa berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja dalam mencapai tujuan yaitu program pendidikan ramah anak maupun kota layak anak. Oleh karena itu, menurut Rista Istioreny, Pendamping Sosial, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Surakarta, sejauh ini pelaksanaan program pendidikan yang ramah anak di kota Surakarta sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan berbagai penghargaan atau predikat yang telah di raih (Istrioreny, Pendamping Sosial PLKSAI, 2022). Pendidikan yang ramah anak ini dijalankan melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan merupakan salah satu indikator pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pembagian ukuran SRA dalam tingkatan KLA yaitu pada Tingkat Pratama, minimal harus ada satu sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan dari Pra Sekolah, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK dan sekolah luar biasa. Tingkat Madya, terdapat lebih dari 25%, di *Tingkat Nindya* harus ada lebih dari 50% sedangkan Tingkat Utama lebih dari 90% dari jumlah seluruh jenjang satuan pendidikan menjadi SRA. Untuk Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak seluruh jenjang satuan pendidikan harus menjadi Sekolah Ramah Anak (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2020).

Penghargaan pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan lima kategori yaitu (1) Kabupaten/Kota Layak Anak (2) Utama (3) Nindya (4) Madya (5) Pratama (Martani, 2016). Pada tahun 2022 KemenPPPA menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada delapan Kabupaten yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar dan Kota Surakarta sebagai penerima predikat Utama atau predikat tertinggi kedua (KEMENPPPA, 2022). Sebelumnya, pemerintah Surakarta memang sudah mulai mewujudkan program KLA sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2019 Surakarta mendapatkan predikat utama secara berturut-turut. Didapatkan karena dinilai telah melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak anak secara sistematis (Lubis & Nurhasan, 2021).

Sedangkan menurut Shoim Sahriyati, Direktur Yayasan Kepedulian untuk Anak, salah satu tahap perkembangan program pendidikan layak anak di Kota Surakarta saat ini yaitu sudah banyak satuan pendidikan yang mendeklarasikan diri sebagai SRA, baik sekolah negeri, swasta maupun madrasah. Hal ini didorong atas kerja sama antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan berbagai pihak yang terkait. Deklarasi SRA ini bahkan sudah diresmikan melalui SK setiap dinas dan SK Walikota Surakarta tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) nomor 421/73 tahun 2019. Melalui SK tersebut Pemerintah Kota menyampaikan bahwa sekolah wajib menciptakan suasana yang kondusif, sehingga anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya dan semua anak mendapat hak yang sama, diperlakukan adil di sekolah tanpa memandang suku, ras, agama, pintar atau kurang pintar, kaya ataupun miskin. Salah satu tanda sekolah sudah mendeklarasikan diri menjadi SRA yaitu telah dipasang spanduk atau banner bahwa sekolah tersebut adalah ramah anak. Bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat maupun satuan pendidikan lainnya dan semua sekolah sudah melaksanakan hal tersebut (Sahriyati, 2022).

Program lain yang sudah dikembangkan oleh SRA di Surakarta, pertama, memberikan kesempatan sekolah bagi anak korban kekerasan seksual, sehingga sekolah tidak langsung membuat keputusan mengeluarkan anak. Namun, lebih menekankan bagaimana kepentingan terbaik untuk anak. Kedua, sekolah setingkat SMP dan SMA juga sudah berinisiasi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak (kekerasan, tindak pidana perdagangan orang dan *bullying*). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah mulai berinisiasi dan berupaya melindungi anak. Beberapa sekolah juga sudah ber MOU dengan Yayasan KAKAK mengenai penguatan isu perlindungan anak (Sahriyati, 2022). Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK) merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak (ESA), anak sebagai konsumen dan anak dalam situasi darurat. Memiliki wilayah kerja di eks karesidenan Surakarta yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen,

Wonogiri dan Klaten. LSM juga memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dan ikut terlibat dalam menangani permasalahan anak (Yayasan Kakak, n.d.).

Untuk terselenggaranya program pendidikan ramah anak atau kota layak anak perlu ditunjang dengan manajemen publik dan kedisiplinan yang baik, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dan *multistakeholdernya*. Menurut Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak, DP3AP2KB Surakarta, Andriani juga menilai bahwa segala upaya yang dilakukan untuk meraih keberhasilan dapat dinilai dari predikat KLA Utama yang diterima Kota Surakarta. Hal tersebut di dukung melalui penguatan program dan pemenuhan program serta membangun komunikasi dan sinergitas yang baik, sehingga tidak ada lagi kejanggalan antar pihak dan diharapkan selalu siap untuk anak-anak Indonesia, Kota Surakarta umumnya (Andriani, 2022).

Menjadi sekolah yang ramah anak berarti semua anak harus diperlakukan sama apapun statusnya. Apalagi Pemerintah Kota Surakarta berencana, berkomitmen dan berupaya meningkatkan akses dan akseptabilitas bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi serta menyatakan siap memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Kemudian siap juga melakukan evaluasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Salah satu bentuk upaya mewujudkan cita-cita tersebut di Surakarta sudah ditunjuk beberapa sekolah umum yang bisa untuk anak-anak disabilitas (Surakarta, n.d.).

Berdasarkan analisis manajemen publik (Nor Ghofur), pelaksanaan program dan disiplin atau evaluasi kontrol sudah berjalan melalui integrasi dari kementriannya masing-masing yang berada di bawah gugus tugas KLA (program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus hak anak) di Kota Surakarta dengan di dilakukan rapat pertemuan bersama sampai tiga kali dalam setahun (Andriani, 2022). Gugus Tugas KLA sendiri adalah sebuah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Dalam mengimplementasikan rencana, proses pembelajaran SRA tidak hanya tanggung jawab sekolah saja. Partisipasi anak-anak menjadi penting dalam penerapan SRA, melalui, anak-anak diajak berbicara dan berdiskusi, sehingga hasilnya bisa menjadi evaluasi untuk mengembangkan sekolah tersebut. Partisipasi orang tua juga sangat diperlukan, karena jika tidak ada komunikasi dengan orang tua, maka sekolah tidak akan berjalan baik. Selain itu, komunikasi dan kerja sama dengan lembaga masyarakat juga diperlukan. Seperti halnya ketika sekolah memanggil lembaga masyarakat untuk mengajar dan memberi memotivasi anak-anak dengan program BI mengajar atau walikota mengajar. Dunia usaha juga harus *care* dengan anak-anak dan pemerintah Kota Surakarta sudah kerap melibatkan *stakeholder* tersebut.

“Terkait materi pendidikan yang ramah anak dalam praktiknya, disiplin positif yang dilakukan bukan guru memberikan hukuman, tetapi guru harus mendidik dengan cara yang

baik dan tanpa hukuman. Contoh: anak tidak diberi hukuman melainkan bisa dengan memotivasi dan membangun komitmen bersama yang disepakati menjadi aturan. Namun, ketika anak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tidak terlambat dll mereka harus dikasih penghargaan atau sekali waktu dikasih hadiah dan lain-lain.

Pendidikan budi pekerti sebagai pendukung sekolah ramah anak merupakan modal sosial kuat dalam aspek pembelajaran yang bisa menguatkan hubungan antara guru, siswa, orangtua, dan masyarakat di Kota Surakarta. sehingga 4 unsur modal sosial bisa ditingkatkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang sebagai salah satu indikator utama Kota Layak anak. Modal sosial itu adalah saling percaya, norma, serta jaringan dan keterkaitan. Sekolah ramah anak diidentifikasi secara mudah antara lain dengan melihat ruang WC yang terpisah antara laki laki dan perempuan. Kondisi sarana prasarana yang bersih dan aman. Metode dan waktu pembelajaran yang efektif juga mampu membangun kesadaran dan nalar kritis siswa. Aturan yang disepakati bersama anak anak. Transportasi yang aman menyenangkan termasuk konsumsi dan alat permainan anak yang edukatif dan terkontrol.

Hambatan pelibatan anak dalam penyusunan kebijakan termasuk pelaksanaannya terjadi di beberapa kota. Kemudian, metode CBSA, pendekatan disiplin positif untuk membangun partisipatif siswa tidak dilaksanakan dengan baik. Belum sepenuhnya sekolah mampu menerapkan metode dan pendekatan yang tepat, termasuk sarana prasarana yang terbatas mempersulit terwujudnya sekolah ramah anak yang ideal di Kota Surakarta. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama (Andriani, 2022).”

Faktor pendukung pelaksanaan program maupun penilaian dilihat dari kebijakan yang dikembangkan, diputuskan berdasarkan rapat untuk menentukan program atau kebijakan yang diterapkan di kantor. Salah satunya pada perencanaan jangka panjang yang tercantum dalam rencana strategis (RENSTRA lembaga). Selain itu juga dilakukan evaluasi program atau evaluasi kerja, salah satu pembahasannya mengenai bagaimana masukan atau input yang diberikan oleh staf pelaksana program. Hasil evaluasi ini yang digunakan oleh pengurus untuk menentukan kebijakan dan menyusun kembali program kedepan. Jika persoalan bisa diselesaikan oleh pengurus pelaksana harian akan diselesaikan tetapi jika membutuhkan peran dari pembina makan akan dikomunikasikan persoalan dan pemecahan persoalan tersebut (Sahriyati, 2022).

Organisasi yang merupakan insitusi rasional dalam mencapai tujuannya perlu melalui sistem aturan yang jelas dan otoritas formal. Karena koordinasi dan pengendalian merupakan kunci tercapainya rasionalitas dalam organisasi. Peter Blau dan Richard Scott mengatakan bahwa terdapat dua hubungan dalam organisasi yaitu formal dan informal, adanya hubungan informal berasal dari struktur organisasi formal. Hal itu membantu organisasi formal dalam menetapkan norma dan aturan bekerja. Norma, aturan yang muncul dari komunikasi organisasi yang dibangun KAKAK yaitu adanya CPP (*Child Protection Policy*) yang harus dipatuhi oleh semua staf pelaksana harian KAKAK. Semua menandatangani ketika menjalin kesepakatan kerja serta ada juga kode etik bekerja dengan anak.

Sedangkan norma atau aturan yang muncul dari komunikasi organisasi yang dibangun PLKSAI yaitu dengan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan organisasi eksternal melalui proses komunikasi formal seperti bersurat secara resmi. Namun, meskipun PLKSAI terintegrasi dengan dinas atau lembaga formal lainnya, tetapi tidak berarti PLKSAI tidak menggunakan norma atau aturan ketika berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan tersebut.

“Jadi ketika butuh bantuan kita akan bersurat secara resmi, walaupun secara awalnya jika darurat kita hanya Whatsapp (WA) tapi secara aturan berlaku kita lakukan seperti tetap bersurat, permisi, minta tolong dan lain-lain, sehingga komunikasi tetap terbangun dengan baik dan sesuai aturan (Istrioreny, Pendamping Sosial PLKSAI Surakarta, 2022).”

Pada intinya, pendekatan integratif yang dilakukan PLKSAI dengan organisasi lain tetap menggunakan norma atau aturan. Maka dari itu, ketika membutuhkan bantuan akan tetap bersurat secara resmi, sehingga komunikasi tetap terbangun dengan baik dan sesuai aturan dan ketika ada kasus makin cepat terlayani, cepat terpecahkan, melalui satu pintu di PLKSAI.

Penguatan dan dukungan sumber daya organisasi akan mempermudah dan mempercepat tercapainya rencana kerja organisasi yang telah disusun sebelumnya. Upaya yang dibangun dalam menguatkan kinerja dan produktifitas SDM di Yayasan KAKAK pada tingkat lembaga memiliki tanggung jawab kerja yang dituangkan dalam MOU. Tanggung jawab kerja dilakukan dan bertanggung jawab pada koordinator program, untuk koordinator program bertanggung jawab pada penanggungjawab program (Direktur). Selain itu juga ada rapat yang dilakukan berjenjang, mulai dari tim program, koordinasi lembaga (rapat staf pelaksana harian) dituangkan menjadi sosialisasi kebijakan lembaga dan *feed back*. Sedangkan rapat pelaksana harian membahas persoalan yang muncul. Susunan tugas masing-masing orang di KAKAK berbeda-beda sesuai dengan jabatan di lembaga dan di program.

Selain itu, pengurus melakukan assesement dengan menggali kebutuhan dari pelaksana program. Salah satu kebutuhan yang digali adalah tentang penguatan program yang akan dijawab dengan pelatihan atau peningkatan kapasitas staf. Contoh saat ini staf merasa masih lemah mengenai perspektif gender, khususnya staf baru, sehingga KAKAK mengagendakan pelatihan analisis gender dalam program. Bukan hanya itu, saat ini dibutuhkan keperpihakan pada kelompok minoritas transgender, sehingga KAKAK membuat pelatihan SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity). Sebagai apresiasi staf, insentif diberikan kepada staf berdasarkan pada *performance review* yang dilakukan setiap setahun sekali. Selain itu juga ada tunjangan kerja yang diberikan untuk kebutuhan pembelian barang dalam rangka mendukung kerja. Peningkatan kapasitas direncanakan di tingkat lembaga dengan beberapa cara yaitu dilakukan internal sesuai kebutuhan dengan mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan yang

ditawarkan pihak luar, *team building* yang dilakukan setiap tahun atau bisa jadi lebih tergantung kebutuhan.

Setelah diadakan kontrol program dan evaluasi dalam penerapan manajemen publik serta upaya penguatan program. Kemudian muncul kebijakan yang merupakan bagian dari produk atau hasil seperti yang telah disebutkan oleh Katz dan Khan dalam teorinya. Produk dibuat disesuaikan dengan enam komponen SRA yang meliputi: *Pertama*, kebijakan SRA dengan bentuk komitmen daerah dan sekolah, ditunjukkan melalui deklarasi SK tim SRA, SK pemerintah daerah dan kebijakan sekolah yang mewakili perspektif anak. *Kedua*, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan SRA, dengan minimal ada dua orang pendidik atau tenaga kependidikan yang terlatih SRA. *Ketiga*, menciptakan proses belajar yang ramah anak dengan cara yang menyenangkan dan proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. *Keempat*, sarana dan prasarana ramah anak yang nyaman, aman dan tidak membahayakan anak. *Kelima*, partisipasi atau melibatkan anak dalam kegiatan perencanaan program, tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA. *Keenam*, partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, *stakeholder* lainnya dan alumni.

Komponen tersebut menjadi satu kekuatan sekolah kemudian menjadi sekolah yang ramah anak dan setiap kebijakan harus menjadi kepentingan terbaik anak. Berikut beberapa contoh penerapan komponen SRA; kebijakan proses belajar yang ramah anak utamanya adalah tidak mendeskreditkan anak-anak. Namun, dibuat yang berkarakter, berperilaku dan itu menjadi tanggung jawab guru. Karena delapan jam kehidupan anak-anak ada di sekolah. Oleh karena itu, bagaimana sekolah itu membentuk anak-anak, itu menjadi tanggung jawab dari sekolah. Sedangkan perkembangan sarana dan prasarana yang ramah anak, masih menjadi dilema, karena beberapa sekolah yang lama ada yang belum ramah anak. Namun, perlahan-lahan sekolah tersebut sudah bisa mengerti indikator SRA, seperti kursi dan meja yang runcing pinggirnya itu masuk kategori sarana yang tidak ramah anak, sehingga hal itu akan diperbaiki. Selain itu, setiap SRA harus ada CCTV dan toilet putra dan putri harus dibedakan (Andriani, 2022). Kebijakan atau layanan CPP (*Child Protection Policy*) yang menjadi dasar jika ada pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kebijakan perlindungan anak juga diterapkan di Surakarta (Sahriyati, 2022).

Dampak Komunikasi Organisasi Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak di Surakarta Bagi Lembaga – Lembaga yang Terlibat

Pemerintah menargetkan Indonesia Layak Anak (Idola) bisa terwujud pada tahun 2030 sesuai tahapan SDGs, dengan syarat telah ada 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan KLA. Namun, sejak Kementerian PPPA mengeluarkan program KLA pada tahun 2006 baru 386 kabupaten/kota yang melaksanakan program tersebut. Menurut Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, 128 kabupaten/kota itu juga tidak berarti belum melakukan apa-apa tetapi pencapaian KLA ini butuh sistematisasi mulai dari perencanaan sampai implementasi. Diharapkan kepala badan perencanaan daerah serta kepala instansi yang mengampu perlindungan anak untuk belajar bagaimana penyelenggaraan KLA yang dilakukan Pemkot Surakarta (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, n.d.).

Mendapatkan KLA utama merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah kota Surakarta bisa mengkomunikasikan, membangun dan pemenuhan program. Membangun komunikasi dan sinergitas yang baik, tidak ada lagi kejanggalan, sehingga selalu siap untuk anak-anak Indonesia di kota surakarta umumnya (Andriani, 2022). Karena melalui komunikasi organisasi yang dibangun, akan semakin menguntungkan bagi masyarakat.

“Karena ketika kita solid, ketika memiliki komunikasi yang baik sehingga ketika ada kasus layanan-layanan itu semakin cepat terlayani, semakin cepat terpecahkan, karena tidak akan terpingpong kemana mana, karena susahnya harus mengelilingi dengan organisasi lain, sehingga cukup dengan masuk ke PLKSAI keluar masalah itu bisa terpecahkan, begitu satu pintu (Istioreny, Pendamping Sosial PLKSAI, 2022).”

Penerimaan komunikasi organisasi yang dibangun dalam menguatkan program KAKAK dapat dilihat dari beberapa lembaga yang menjalin kerjasama dengan KAKAK dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Di beberapa lembaga bahkan mengapresiasi aturan yang sudah dikembangkan. Salah satunya dengan kebijakan perlindungan yang diterapkan. Hal tersebut juga dikenalkan pada lembaga pemberi layanan, PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) Kota Surakarta. Masyarakat yang bekerjasama dengan KAKAK juga akan diberikan informasi yang berkaitan dengan kode etik bekerja dengan anak (bagian dari CPP/*Child Protection Policy*) (Sahriyati, 2022).

Selain penerimaan, kritik yang membangun juga dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Andriani di dalam sebuah organisasi atau lembaga tidak boleh adanya egosentris, seperti halnya DP3AP2KB Surakarta dalam melakukan perlindungan anak dengan mengkomunikasikan terus menerus, hal itu bukan semata-mata sekadar tupoksi sebagai dinas perlindungan anak. Namun hal itu dilakukan memang untuk kepentingan terbaik anak-anak di Surakarta. Sejauh ini di Kota Surakarta berjalan lancar, sehingga bisa terjalin membuat inovasi yang lebih baik lagi.

Istioreny juga mengungkapkan hal serupa bahwa, dalam menguatkan program, perlunya menurunkan egosentris di masing-masing organisasi maupun perorangan sehingga komunikasi yang

harus mendapatkan penyelesaian masalah atau jalan tengah yang harus dilakukan bersama menjadi lebih mudah. Setiap organisasi juga harus meluangkan waktu untuk bersama-sama memecahkan suatu masalah, selain memang bertemu untuk bertukar informasi, agar komunikasi bisa menguatkan program semakin kuat dan baik.

PENUTUP

Simpulan

Keberadaan organisasi dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas yang dihasilkan dan diterima pasar atau lingkungan eksternal organisasi. Untuk memperkuat daya dukung organisasi tidak bisa dilepaskan dari peran sumber daya organisasi. Penguatan dan dukungan sumber daya organisasi akan mempermudah dan mempercepat tercapainya rencana kerja organisasi yang telah disusun sebelumnya. Seluruh kegiatan atau produk organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kegiatan umpan balik dari eksternal organisasi menjadi penting dan harus dikelola secara maksimal melalui sistem komunikasi organisasi formal, karena organisasi tidak bisa lepas dari aturan, kebijakan, kode etik & SOP.

Tidak dapat dipungkiri juga tetap ada komunikasi organisasi informal yang dibangun dalam mewujudkan pendidikan ramah anak dan kota layak anak. Namun, dapat disimpulkan bahwa jaringan komunikasi yang dibangun lebih dominan pada komunikasi formal horizontal, diagonal dan pola jaringan bintang atau segala arah dalam beberapa forum forum atau program kegiatan yang diwujudkan dalam perencanaan, arah kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring seluruh stakeholders Kota Surakarta yang terkait SRA. Komunikasi yang dibangun lebih ditekankan isi dan tukar pesan dengan kesetaraan tanpa mengabaikan profesi tugas kerja masing masing. Media juga berperan penting sebagai indikator sosialisasi dan kepedulian pemerintah dan organisasi dalam mewujudkan kota layak anak.

Terwujudnya pendidikan yang layak anak di Surakarta tidak bisa lepas dari komunikasi organisasi yang dibangun di tiap-tiap *multistakeholder* dengan membuat program bersama, bersinergi melalui rapat kegiatan bersama. SDM, Jejaring, fasilitas dan Pendidikan budi pekerti menjadi modal sosial kuat dalam memaksimalkan SRA di Kota Surakarta. Selain itu, dengan modal sosial yang ada juga mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan terwujudnya Kabupaten Layak Anak yang lekat dengan upaya anggota organisasi untuk optimalisasi kerja.

Terwujudnya pendidikan ramah anak juga tidak bisa lepas dari kritik, penerimaan dan apresiasi yang kerap dilakukan oleh gugus tugas SRA, Staf Pelaksana program juga mitra terkait. Tidak boleh adanya egosentris di masing-masing lembaga, penerimaan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak

serta adanya apresiasi, insentif ataupun *feedback* juga menjadi salah satu faktor terwujudnya tujuan SRA yang bisa menghantarkan pada KLA yang diinginkan. Keterpaduan program dan layanan sangat mendukung tercapainya Sekolah Ramah Anak yang ideal.

Saran

Dalam penelitian ini belum ditemukan secara mendalam bagaimana komunikasi organisasi yang dilakukan dalam layanan cepat (*fast service/fast track*) tertuang dalam SOP sebagai komunikasi yang tertulis dalam sebuah organisasi di semua layanan mitra bisa terpenuhi. Komunikasi tertulis penting sebagai patokan implementasi kebijakan yang *sustainable*, modal sosial (*system*) dan juga administratif pendukung layanan. Komunikasi struktural vertikal lebih pada layanan teknis perlu dikuatkan dengan SOP dengan tidak mengabaikan kebutuhan anak, pertimbangan dari komunikasi kesetaraan lebih diutamakan. *Branding* ramah anak berikut juga slogan terlihat belum dikomunikasikan bersama menjadi sebuah program yang maksimal dipromosikan, entah dalam bentuk papan nama, baliho dll yang tidak hanya di sekolah sekolah tetapi juga mitra program ramah anak. Evaluasi, *feedback* maupun kepuasan publik belum maksimal dilaksanakan sebagai acuan pengembangan layanan yang pastinya dikomunikasikan di tiap rapat program ataupun momen tertentu, yang harusnya tidak hanya melibatkan anak di sekolah tetapi juga klien, orangtua maupun lingkungan sekitar yang punya peran besar dalam perlindungan anak. Poin poin inilah yang perlu jadi perhatian dalam penguatan komunikasi organisasi di lembaga yang berhubungan dengan khalayak luas dan berbagai mitra baik pemerintah, LSM, Aktivistis, media dll. Modal sosial nilai, kepercayaan, norma dan moral akan semakin kuat jika didukung aturan, kesepakatan bersama, dan visualisasi yang jelas dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrina, A., Aprison, W., Sesmiarni, Z., Iswantir, M., & Mudinillah, A. (2022). Sekolah ramah anak, tantangan dan peluangnya dalam pembentukan karakter siswa di era globalisasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6803–6812.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2020). Pedoman Sekolah Ramah Anak. *Pedoman Sekolah Ramah Anak*, 2.
- Kemendikbud, B.-P. (2014). *Model pengembangan program desa ramah anak 2014* (p. 24). Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional V
- KEMENPPPA. (2022). *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak*. KEMENPPPA. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2015). *Panduan sekolah ramah anak*.
- Lubis, E. S., & Nurhasan, N. (2021). Kesesuaian Taman Kota Jaya Wijaya Sebagai Taman Kota Layak

- Anak Di Surakarta. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 378–387.
- Martani, L. R. R. H. S. (2016). *Kabupaten Kota Layak Anak Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Surakarta Kembali Raih Kota Layak Anak*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-kembali-raih-kota-layak-anak-utama/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Solo Jadi Rujukan Kabupaten atau Kota Layak Anak*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/solo-jadi-rujukan-kabupaten-kota-layak-anak/>
- Republika. (2022). *UNICEF Bantu Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/61589/unicef-bantu-peningkatan-mutu-pendidikan-di-indonesia>
- Shunhaji, A., & Hasanah, H. (2019). Pendidikan Ramah Anak Perspektif Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Madinatun Rahmah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 18(2), 425.
- Strauss, A. L. (1990). *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge Univ. Press.
- Supeni, S., Handini, O., & Al Hakim, L. (2021). *Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak*. Unisri Press.
- Surakarta. (n.d.). *Surakarta Siap Jadi Kota Inklusi Berkelanjutan, Ini Upaya Pemerintah Kota Dalam Pemenuhan Hak-hak Difabel di Masa Pandemi!* <https://surakarta.go.id/?p=22454>
- Toha, M. (2002). *Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada.
- Wawancara, Andriani, Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Surakarta, 02 Oktober 2022.
- Wawancara, Rista Istrioreny, Pendamping Sosial PLKSAI Surakarta, 28 September 2022.
- Wawancara, Shoim Sahriyati, Direktur Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK), 28 September 2022.
- Wuryandani, W., Faturrohmah, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94.
- Yayasan Kakak. (n.d.). *No Title*. <http://yayasankakak.org>